

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kategori pembangunan yang masih dalam tahap berkembang, sehingga turut berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam skala nasional. Pada hakikatnya pembangunan memiliki esensi yang luas untuk menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang kuat, mandiri, serta mencapai kesetaraan keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penegasan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mengemban amanat rakyat dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah secara berkelanjutan, sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat ditopang dengan baik. Kesejahteraan masyarakat harus memenuhi skala prioritas dan menjadi orientasi utama dalam melaksanakan nafas pembangunan terutama di tingkat desa. Mandat besar pemerintah sebagai pemangku kebijakan memerlukan komitmen dan prinsip yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan yang berkualitas pula (Jepri, 2019).

Pembangunan yang menuju cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat senantiasa memerlukan dukungan SDM berkualitas. Kesejahteraan masyarakat perlu diwujudkan melalui kontribusi utama dari pemerintah, serta masyarakat juga mampu berkontribusi melalui penggalian potensi internal pada wilayah masing-masing. Kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat diupayakan melalui

pembangunan dan manajemen pengelolaan sumber daya secara padu dengan pemberian hak otonom terhadap pemerintah. Di tingkat desa, hak otonom selalu melekat penuh dan menjadi harapan baru bagi pemerintah serta masyarakat desa untuk menyongsong kebutuhan maupun merealisasikan aspirasi. Aparatur desa memiliki koridor untuk melakukan pengelolaan sumber daya desa yang secara tidak langsung turut membuka ruang kreativitas. Di sisi lain keterlibatan masyarakat juga perlu dipandang sebagai faktor pendorong yang penting terutama dalam masalah pembangunan. Pemerintah desa sebagai pengelola kebijakan harus secara bijak untuk menggunakan aset sumber daya kepada masyarakatnya, karena status masyarakat adalah subjek yang merasakan dampak langsung (Jepri, 2019)

Keberadaan Desa secara normatif tertuang jelas melalui penjabaran peraturan perundang-undangan dalam PP No.27 Tahun 2005 tentang desa. Desa dideskripsikan sebagai suatu wilayah yang mengandung ciri maupun karakteristik sosial, hukum, adat istiadat, serta adanya kekayaan alam dan batas per wilayah tersendiri. Selain itu desa memiliki masyarakat sebagai penghuni tunggal yang saling mempertahankan eksistensi demi mencapai kepentingan maupun kebutuhan untuk saling melengkapi satu sama lain. Sistem dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keberadaan desa dalam tatanan struktur formal yang mampu untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Prinsip dasar yang muncul dari pemahaman tentang keberadaan desa adalah dengan memposisikan desa sebagai suatu organisasi politis dalam arti mampu untuk menaungi urusan warga

masyarakatnya melalui implementasi kebijakan secara kolektif (Lai & Tang, 2016).

Salah satu Desa kecil namun sarat akan potensi pembangunan dan sumber daya alami adalah Desa Karangpatihan yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan ini sejak terkenal di dunia maya dengan sebutan warganya yang memiliki keterbelakangan mental atau Tuna grahita serta dengan kepemimpinan muda dari seorang Eko Mulyadi yang memiliki ide kreatif dan aktif dan hingga namanya terkenal di publik nasional. Eko Mulyadi juga aktif selaku menjadi kepala desa hingga dua periode, terkenalnya Eko Mulyadi ini juga sempat mendapatkan beberapa penghargaan inspiratif dari berbagai pihak swasta maupun pemerintah pusat dalam kepiwaiannya mengedukasi serta memberi keterampilan kepada masyarakat “Tuna Grahita”. Suatu permasalahan yang ada pada kelompok masyarakat “Tuna Grahita” ini memang secara garis besar turun temurun berdasarkan kondisi yang ada pada Desa Karangpatihan sejak jaman dahulu yang garis kemiskinan serta ketidakberdayaannya warga keterbelakangan mental untuk hidup mandiri.

Kondisi masyarakat Desa Karangpatihan yang demikian telah menggugah inisiatif dan empati dari sebagian orang yang dipelopori oleh seorang Eko Mulyadi untuk mendirikan gubuk kecil bernama “Rumah Harapan” pada tahun 2013. Tujuan awal dari dibangun nya Rumah Harapan adalah untuk memantik sifat swadaya dari masyarakat “Tuna Grahita” agar terdapat peningkatan kesejahteraan dan kualitas secara mandiri. Dengan kata lain, Rumah Harapan bertujuan untuk meminimalisir

ketergantungan konsumtif terhadap orang lain serta membuktikan bahwa kekurangan mampu untuk ditutupi dengan etos kerja dan proses pelatihan dalam rangka bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rumah Harapan merupakan wadah untuk menampung segala kekurangan dan keterbelakangan (fisik & mental) serta tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah melalui sosialisasi dan pelatihan keterampilan. Sehingga pada akhirnya karya dari kemampuan untuk menerapkan keterampilan dapat dikomersilkan, demi mendapat penghasilan dan keuntungan jangka panjang (Amila, 2017).

Seppriyan (2018) dalam penelitiannya juga menggambarkan keadaan sebenarnya di Rumah Harapan Desa Karangpatihan sehingga menemukan beberapa fakta sekaligus berlaku sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan program pemberdayaan masyarakat tunagrahita dalam bentuk pemberian *life skill* berupa kerajinan tangan yakni meliputi berbagai macam proses seperti adanya perencanaan mendasar, identifikasi permasalahan dan kebutuhan, serta adanya pelaksanaan kegiatan dimana selalu diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk menuju kedisiplinan. Kemampuan warga tunagrahita cenderung mengalami pemeliharaan, sehingga setiap produk buatan selalu siap untuk dikelola lebih lanjut. Selain itu ditemukan bahwa terdapat faktor pendorong yang signifikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas hidup di dalam Rumah Harapan, seperti memadai nya ketersediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah Desa. Di sisi lain, faktor penghambat yang dapat dimunculkan adalah belum adanya pendampingan dari orang sekelas

tenaga fasilitator profesional atau sejenisnya. Rumah Harapan pada akhirnya memberikan implikasi bahwa keterbatasan fisik dan mental (warga tunagrahita) tidak menutup kemungkinan untuk tercipta kelompok kreatif sekali pun proses edukasi tidak mudah. Secara tidak langsung, Rumah Harapan berhasil memberikan ruang tepat bagi warga tuna grahita untuk melakukan edukasi serta tetap melakukan pendampingan kepada warga Tuna grahita untuk memberikan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian warga Tuna grahita. Dengan keterampilan yang diberikan Pemerintah Desa dan Pengurus Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit ini bertujuan agar mereka tidak mengharap belas kasih dari para pedonatur atau bergantung pada pemberian orang – orang yang memberikan bantuan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah Desa Karangpatihan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara kreatif dan inspiratif. Desa Karangpatihan telah membuktikan bahwa potensi dan minimnya keadaan SDM dalam kondisi apa pun, tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan ketika terdapat kesadaran, keuletan serta etos kerja keras dari sebagian orang yang tergolong peduli dan memiliki kecintaan besar terhadap tanah kelahirannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

program rumah harapan karangpatihan bangkit di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain. Kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meng ambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan untuk menambah wawasan sekaligus merupakan penerapan ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah.

E. Penegasan istilah

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi (irwandi , andrizal, 2013).

2. Pemerintahan Desa

Menurut Pemerintah Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Apa yang dikatakan artinya Pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ulumiyah, 2013).

3. Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit

adalah program yang digunakan untuk menyediakan pemberdayaan masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan dan khusus untuk masyarakat tunagrahita. Program ini direncanakan sebagai bentuk kegiatan terprogram mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi (Nisa, 2020).

F. Landasan Teori

Dalam merumuskan penjelasan konkrit tentang istilah kebijakan, maka perlu untuk mengacu pada sumber pustaka yang relevan. Secara umum kebijakan adalah suatu cara yang dilakukan oleh otoritas kekuasaan melalui tindakan, ide, maupun gagasan pemimpin dalam rangka memenuhi kebutuhan publik (masyarakat). Kondisi masyarakat merupakan objek yang harus selalu diperhatikan oleh pemangku kebijakan (pemerintah) untuk memicu adanya implementasi kebijakan secara adil dan tepat guna. Maka dari itu, acuan pustaka di bawah ini bersifat sebagai penguat yang mengandung esensi luas tentang konsep kebijakan maupun implementasi kebijakan publik.

1. Konsep & Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle dalam Budiono (2015) terdapat beberapa macam konsep kebijakan sekaligus serangkaian model implementasinya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, konsep kebijakan sebagian besar bersumber dari pengaruh kepentingan pihak tertentu atau identic dengan sebutan (*interest group*). Kepentingan dari kelompok tersebut cenderung bersifat kolektif, atau dari sudut pandang keuntungan maka bersifat individual. Fakta tentang faktor kepentingan kelompok pada akhirnya menuntut pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk menggunakan anggaran dan mencakup segala kepentingan publik secara bijak agar tidak ada pihak yang dirugikan.

- b) Kedua, kebijakan yang diimplementasikan harus memiliki manfaat yang berdampak kepada kelompok sasaran. Manfaat kebijakan tersebut yang menjadi pendorong pelaksanaan dan menjadi titik tujuan sebuah kebijakan yang dilaksanakan.
- c) Ketiga, orientasi perubahan merupakan konsep utama untuk mencanangkan kebijakan lama maupun baru. Maka dari itu, dalam proses merancang dan melakukan implementasi kebijakan akan muncul penargetan-penargetan tertentu sesuai dengan kehendak awal yang ingin dicapai. Ketika suatu isi kebijakan terlebih dahulu dijelaskan kepada publik (target) maka kekhawatiran terhadap salah sasaran atau pun efektivitas kebijakan dapat diminimalisir.
- d) Keempat, sangat penting untuk mencermati letak pengambilan keputusan dalam konteks implementasi kebijakan. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan seksama dapat mencegah terjadinya arus tumpang tindih dari adanya program-program yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu kejelasan terkait materi kebijakan lebih baik dilakukan dengan cermat, bertahap, dan mendatangkan keterwakilan dari banyak pihak.
- e) Kelima, bobot dari suatu kebijakan harus mampu dipahami dan dijadikan tolok ukur oleh pelaksana kebijakan. Mempertimbangkan kapasitas dan daya yang dimiliki merupakan alternatif untuk meminimalisir kerugian. Selain itu, pertimbangan terkait dengan kemampuan dalam melakukan implementasi kebijakan ke depan

harus didukung oleh komitmen dan sinergi internal agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai.

- f) Keenam adalah manajemen dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Melakukan *screening* untuk menghasilkan SDM unggul dapat dilakukan lewat banyak cara, salah satunya adalah dengan manajemen dan pelatihan secara berkala. Ketika syarat SDM terpenuhi dengan baik, maka implementasi kebijakan tidak akan mengalami kendala lapangan karena ter-cover oleh kemampuan SDM dalam melakukan tata kelola isi kebijakan tertulis.

2. Pembangunan dalam Konteks Kesejahteraan

Topik penelitian ini adalah “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Rumah Harapan”. Jika dicermati, serangkaian kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk program adalah bagian dari pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu beberapa rujukan pustaka di bawah sangat berhubungan erat dengan esensi pembangunan yang memiliki kesamaan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih berdaya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Siagian dalam Ulumiyah (2013) memiliki pandangan logis yang menyatakan pembangunan adalah serangkaian usaha dengan tujuan menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat secara bertahap baik oleh pemerintah nasional hingga pemerintah desa menuju modernitas keadaan masyarakat dengan lebih baik.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo dalam Ulumiyah (2013) seakan memiliki perspektif yang sama dengan menganggap bahwa proses pembangunan harus meliputi kegiatan berkelanjutan hingga kondisi sasaran pembangunan mencapai keadaan tertentu dengan catatan berada pada level lebih baik dari sebelumnya. Tjokroamidjojo juga menambahkan ciri suatu program yang baik dapat diukur dari beberapa parameter seperti:

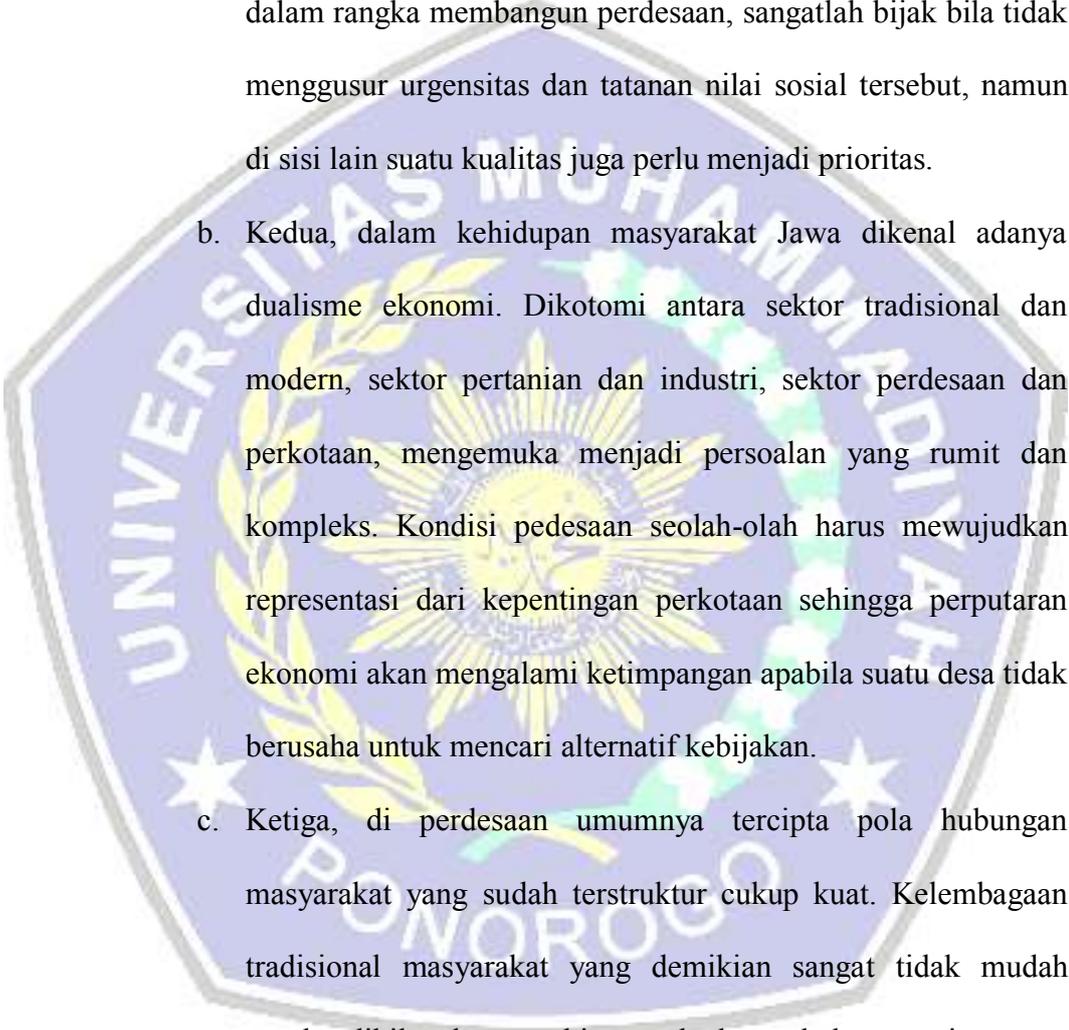
- a. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.
- b. Penentuan peralatan dan dukungan banyak mitra yang terbaik untuk mencapai tujuan program pembangunan.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan rincian pembiayaan yang dan keuntungan-keuntungan yang ditafsir sebisa mungkin pasti akan dihasilkan oleh program tersebut dengan prosentase 90%.
- e. Sinkronisasi antara program pembangunan utama dengan potensi kegiatan lain harus diintergrasikan menjadi satu kesatuan aktivitas sehingga suatu program dapat berdampak pada cabang-cabang lain. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri.

f. Terdapat berbagai upaya di bidang manajemen, seperti penyediaan tenaga, pembiayaan, jalinan kemitraan, promosi dan lain sebagainya.

Berdasarkan dengan kedua teori di atas, dapat disimpulkan garis besar dari suatu pembangunan tanpa menemukan adanya kontradiksi (perbedaan pandangan). Pada dasarnya pembangunan merupakan tugas moral bagi suatu unit pemerintah untuk memerdekakan masyarakat dalam wilayah binaannya masing-masing. Pembangunan sendiri tidak bersifat instan, namun prosesnya dapat bersifat lebih cepat maupun lebih lambat tergantung dari seberapa besar dorongan yang diberikan (baik oleh kualitas SDM, keadaan finansial, maupun efektivitas program). Di sisi lain, keaktifan masyarakat dalam mengevaluasi suatu program pembangunan adalah suatu andil yang tentunya berbeda-beda dalam setiap wilayah.

3. Karakteristik Masyarakat Pedesaan

Menurut Sastraatmadja dalam Bachrein (2010) suatu bentuk kebijakan seyogyanya harus memperhatikan sisi penting dari latarbelakang sosiologi masyarakat desa. Jika penelitian ini dikaitkan dengan teori Sastraatmadja, maka kondisi sosiologis masyarakat Desa Karangpatihan yang ada di Kec. Balong Kab. Ponorogo merupakan objek tepat untuk dapat dijadikan perumpamaan (di tengah kondisi masyarakat dengan keterbatasan fisik & mental: tuna grahita). Beberapa karakteristik yang dimaksud diantaranya adalah:

- 
- a. Pertama, masyarakat pedesaan terbentuk oleh tatanan sosial yang sudah mendarah daging (*internalized*) dalam kehidupannya. Nilai sosial seperti kegotong-royongan, paguyuban, serta ikatan kedaerahan merupakan ciri yang melekat sejak sepanjang peradaban berlangsung. Untuk itu, dalam rangka membangun pedesaan, sangatlah bijak bila tidak menggosur urgensi dan tatanan nilai sosial tersebut, namun di sisi lain suatu kualitas juga perlu menjadi prioritas.
- b. Kedua, dalam kehidupan masyarakat Jawa dikenal adanya dualisme ekonomi. Dikotomi antara sektor tradisional dan modern, sektor pertanian dan industri, sektor pedesaan dan perkotaan, mengemuka menjadi persoalan yang rumit dan kompleks. Kondisi pedesaan seolah-olah harus mewujudkan representasi dari kepentingan perkotaan sehingga perputaran ekonomi akan mengalami ketimpangan apabila suatu desa tidak berusaha untuk mencari alternatif kebijakan.
- c. Ketiga, di pedesaan umumnya tercipta pola hubungan masyarakat yang sudah terstruktur cukup kuat. Kelembagaan tradisional masyarakat yang demikian sangat tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga kadang kala memicu rasa kecemburuan sosial apabila tidak diatasi dengan baik melalui implementasi kebijakan yang tepat. Dalam konteks ini lah peran pemerintah desa dituntut untuk cerdas, dengan *men-design*

suatu kebijakan agar dapat diterima oleh seluruh kalangan & kelompok-kelompok kecil di desa.

G. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dari segi konteks, esensi, serta penafsiran dari pembaca maka peneliti membuat beberapa definisi operasional sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh peneliti pada penelitian berjudul **“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Rumah Harapan”**. Ada pun rincian definisinya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Karangpatihan sudah sejak lama identik dengan usaha pemberdayaan terhadap kaum tuna grahita yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dalam konteks ini pemerintah desa karangpatihan dan pengurus rumah harapan karangpatihan bangkit memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembekalan keterampilan yang pada akhirnya mampu dijadikan aktivitas bersifat produksi melalui adanya “Program Rumah Harapan”. Sebagai salah satu proses untuk masyarakat Tuna grahita mendapatkan suatu penghasilan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan agar tidak bergantung kepada pemberian orang lain.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Konteks kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan khusus bagi masyarakat penyandang keterbatasan fisik &

mental (Tuna Grahita). Karena warga yang memiliki keterbelakangan mental ini agar bisa berproses lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka dari itu warga Tuna grahita diberdayakan serta diberi pelatihan tentang kerajinan agar mereka bisa hidup mandiri dalam kedepannya. Dan bisa memperoleh kesejahteraan dengan mendapatkan penghasilan setiap harinya.

3. Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit

Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit adalah suatu wadah atau tempat dimana masyarakat tuna grahita diberi sebuah pelatihan keterampilan untuk bisa berproses dari sebelumnya yang hanya mengharapkan belas kasih dari para pendonatur yang ada di Desa Karangpatihan dan diluar Desa Karangpatihan. Dalam hal ini Pengurus Rumah Harapan Karangpatihan memiliki tekad yang besar bagi warga Tuna grahita agar bisa berkembang dalam kedepannya.

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi ini karena peneliti tertarik terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menutupi keterbatasan fisik & mental masyarakat dengan prestasi dan keuntungan berupa pendapatan dari produk karya kelompok tuna grahita seperti : Batik Ciprat, Kaset, dan lain sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang secara otomatis lebih banyak mendeskripsikan fenomena/kejadian/peristiwa secara tekstual. Menurut Gunawan (2013) metode kualitatif mengedepankan kepekaan dan perspektif dari peneliti sendiri untuk mengembangkan konsep, memahami, serta menafsirkan topik yang sedang diteliti melalui pemahaman terhadap tingkah laku manusia atau objek penelitian secara mendalam.

3. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan mempertimbangkan kemampuan informan dalam menjelaskan maupun mengetahui seberapa jauh informasi yang dapat dibagikan kepada peneliti. Informan dipilih berdasarkan kecakapan dan rekomendasi dari orang lain karena dianggap paling mampu untuk mewakili kelompok sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun rincian informasi yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa Karangpatihan
- Ketua Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit
- 5 Anggota dari Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data secara

konkrit melalui penerjunan lapangan. Beberapa data observasi biasanya dapat dikategorikan dengan gambaran pola hidup, serta interaksi antar manusia (individu maupun kelompok). Identifikasi merupakan langkah awal dalam proses observasi karena berfungsi untuk mengetahui latar tempat dan melakukan pemetaan khusus, di sisi lain peneliti perlu untuk sedikit banyak mengetahui situasi dan kondisi lapangan terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan ketika tiba hari penerjunan lapangan (Raco, 2018).

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk mendalami pengalaman dari objek penelitian secara intens dan mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dan informan berada dalam lokasi yang sama pada saat itu juga. Jawaban dari informan yang secara spontan dilontarkan merupakan bahan penting bagi seorang peneliti untuk turut memahami sembari menggali informasi secara terus-menerus, karena tidak semua fenomena dapat diceritakan dalam waktu singkat. Maka dari itu peneliti dituntut untuk menganalisis jawaban dari para informan baik ketika proses penggalan data maupun usai penggalan data (Raco, 2018).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan

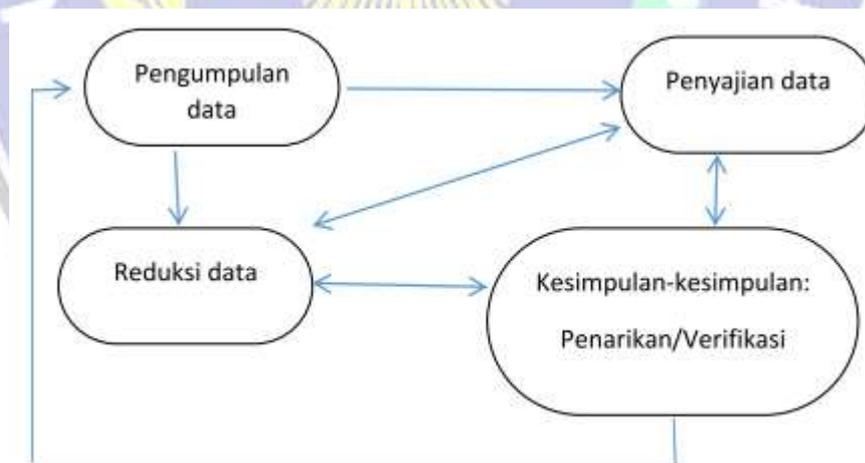
untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data – data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. (Waskito and Sunarto 2016)

5. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998) mengemukakan pengertian analisis data sebagai usaha peneliti untuk menata kembali segala data yang masuk dari hasil observasi maupun wawancara untuk kemudian ditangkai ulang agar lebih mudah dipahami, sistematis, serta menemukan pola terbaik.

Penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang diprakarsai oleh Miles & Hubberman (1992). Gambar dari model interaktif dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1 Analisis Model Interaktif



Sumber : (Rijali, 2019)

Gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari

kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

